

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional merupakan hubungan antara negara yang berbeda dan dipandang sangat krusial serta mutlak di perlukan, karena pada hakikatnya setiap negara pasti saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa berjalan sendirian, selain itu dalam mencapai kepentingan nasionalnya memiliki visi misi yang jelas dan di sesuaikan dengan kebutuhan dari Negaranya. Terjalannya hubungan internasional dilakukan untuk membangun kerjasama, untuk mewujudkan rasa kepedulian antar bangsa, membangun hubungan baik untuk menciptakan perdamaian, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Dengan adanya hubungan internasional yang baik makan akan membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif lagi, serta adanya rasa saling memenuhi kebutuhan yang tidak bisa di dapat dari negaranya namun di dapat dari negara lain.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, fenomena kehidupan internasional yang ada pada saat ini menjadikan lembaga-lembaga internasional semakin umum dan semakin banyak pembentukannya. Lembaga internasional diperlukan untuk mengatur kehidupan internasional yang kian dinamis, di dalamnya membentuk perjanjian-perjanjian antarnegara yang sudah di sepakati bersama, adanya usaha dalam mengintegrasikan regional di Eropa, poin-poin tersebut merupakan gambaran formal untuk dapat melihat bagaimana prospek politik internasional menjadi semakin terlembagakan, hal itu pula yang menunjukkan bahwa telah terjadinya perkembangan yang signifikan dalam organisasi internasional. (Carlsnaes, Risse, & Simmon, 2004, hal. 394). Perjanjian antarnegara terjadi di seluruh cakupan global yang merupakan suatu bentuk upaya dalam menuju ke arah globalisasi dan modernisasi. Implementasi perjanjian internasional

telah diaplikasikan baik itu yang sifatnya multilateral ataupun bilateral, dikarenakan hubungan antarnegara yang terjadi saat ini kian pesat maka dari itu perjanjian di peruntukkan guna memberikan jaminan kepada tiap-tiap negara yang melakukannya dengan berisi kepentingan dari negara tersebut, dengan asas kesepakatan yang telah disepakati., selain itu pula guna mempersiapkan negara-negara anggota dalam menghadapi persaingan global yang kian ketat, karena tiap organisasi internasional berlomba-lomba menjaga keeksistensiannya di mata dunia.

Pada tahun 1994 Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menginisiasi penciptaan satu platform untuk kerjasama sosial-ekonomi dan upaya damai lainnya untuk negara-negara lingkaran Samudera Hindia dan memperkuat kerja sama negara di Asia dan Afrika. Negara Kepulauan Mauritius mengadakan pertemuan pada tanggal 29-31 Maret 1995 dengan perwakilan pemerintah, sektor bisnis dan akademisi dari 7 negara yaitu Afrika Selatan, Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman dan Singapura untuk mengulas peningkatan kolaborasi diantara negara anggota tersebut sehingga terbentuk organisasi regional dengan bernama IOR-ARC atau Indian Ocean Rim - Association for Regional Cooperation pada tanggal 6-7 maret 1997 di Mauritius. (iora.net)

Di bentuknya organisasi regional tersebut dengan tujuan untuk dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan erat melalui kerjasama organisasi regional dengan melakukakn upaya-upaya fasilitasi perdagangan serta bersama-sama meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna memiliki masa depan yang lebih baik bagi seluruh negara anggota IORA.

Perubahan nama Di adakannya Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, Australia yang terselenggarakan pada tanggal 1 November 2013 nama IOR-ARC menjadi IORA telah resmi dirubah. Leighton G. Luke, Manager of Indian Ocean Research Programme, ini juga turut mendukung ketetapan ini, dengan menerangkan bahwa *“The change of name to Indian Ocean Rim Association is important, but it must be just the first step towards raising awareness of the organisation and the work it is doing, along with cultivating a sense of the Indian Ocean rim as a true region, rather than just a series of sub-regions.”* (Luke, 2013)

Diantara samudera-samudera terbesar di dunia, setelah Samudera Pasifik dan juga Samudera Atlantik, Samudera Hindia berada pada urutan ketiga. Memiliki wilayah dengan cakupan lebar kurang lebih 10.000 km dan total luas 67 juta km². Pada bagian barat Samudera Hindia di batasi oleh Afrika dan Semenanjung Arab; di utara dengan Iran; di timur dengan Semenanjung Melayu, Pulau Sunda (mencakup Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera) di Indonesia, dan Australia Barat; dan di Selatan oleh Antartika. Samudera Hindia secara geologis merupakan laut termuda, dimana Samudera Hindia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara Atlantik pada satu sisi dan Samudera Pasifik pada sisi lainnya.

Samudera Hindia telah dikenal sejak lama sebagai jalur lalu lintas yang sangat strategis dalam melakukan perdagangan internasional yang melalui wilayah perairan. Kelebihan dari samudera ini juga memiliki wilayah potensial terkait dengan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, untuk itu tidak heran jika disebut sebagai wilayah yang sangat menjanjikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang ada pada tiga benua, yaitu Afrika, Asia, dan Australia dengan memiliki cakupan wilayah seluas 73,3 juta km². (Verlaan, 2018)

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, keberadaan Samudra Hindia sangat strategis. Menurut Adriana Elisabeth, peneliti dari LIPI, potensi yang ada memiliki nilai strategis, seperti yang di dihasilkan dari *Focal Poin Indian Ocean Rim Academic Group* (IORAG) kemampuan yang dimiliki meliputi sebagai jalur lalu lalang perdagangan dunia, kira-kira sebanyak 50% kapal dagang, 34% lalu lintas kargo, dan 67% pengangkutan minyak dunia melewati wilayah Samudra Hindia. Kemudian, 55% cadangan minyak bumi dan 40% gas berada di kawasan ini (lipi.go). Di lihat dari sisi kepentingan dalam bidang ekonomi, potensi ekonomi negara-negara yang ada di sekitar Samudera Hindia sangat menjanjikan, karena memiliki pasar yang besar dengan total jumlah penduduk sebanyak 2,7 miliar orang, kawasan ini dilewati kurang lebih 70% perdagangan dunia, serta menyimpan sekitar 55 persen cadangan minyak dunia dan 40 persen cadangan gas dunia.

Potensi lainnya yaitu, mempunyai cadangan mineral langka yang bernilai ekonomi tinggi serta menghasilkan sekitar 1/3 produksi tuna dunia dari negara-negara di kawasan tersebut. (kemenperin.go)

Samudera pasifik yang sebelumnya menjadi wilayah bagi negara-negara dalam mengelola potensi kelautan serta kandungan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kini mulai beralih ke Samudera Hindia, dan menjadikan wilayah itu sebagai permulaan dari perkembangan ekonomi politik dengan melakukan suatu upaya kerjasama dalam menggali potensi dan keuntungan dari Samudera Hindia melalui negara-negara yang berada pada kawasan itu. Selain itu pula, kenyataan yang ada di lapangan bahwa minyak nomor satu di dunia merupakan hasil dari negara-negara yang berada pada sekitaran tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa lautan dengan penghasil kandungan mineral dan negara produsen minyak terbanyak di penjuru dunia ini berada di lingkup Samudera Hindia.

Terlepas dari hamparan air luas yang dimiliki oleh laut serta sebagai pemisah antara setiap kawasan, pada hakikatnya banyak terdapat kontribusi penting yang dihasilkan. Keuntungan bagi Indonesia sebagai predikat negara kepulauan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, lautan memiliki peran penting yaitu, sebagai sumber daya laut yang menghasilkan makanan dengan memiliki protein yang tinggi, penghasil garam yang dapat di gunakan pada penyedap makanan, tempat tumbuh dan kembangnya makhluk hidup bagi spesies yang ada di lautan, sebagai jalur transportasi baik itu dalam melakukan perdagangan, riset, ataupun mengambil potensi di dalamnya, selain itu juga sebagai objek pariwisata dalam melihat keindahan bawah laut ataupun melakukan kegiatan air, dan yang terakhir lautan merupakan sumber daya air terbesar dan tidak akan habis jumlahnya.

Negara-negara sekitar perbatasan Samudra Hindia mengalami dilema karena dimanfaatkan secara maksimal oleh negara yang mampu mengelola tetapi juga dapat menimbulkan reaksi dari negara yang tidak dapat memaksimalkan manfaatnya. Kesenjangan sosial dan ekonomi antar negara dilingkar Samudra Hindia memunculkan hambatan perdagangan seperti adanya perompakan. Perompakan adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pengambilalihan harta benda yang terjadi di perairan yang berdampak pada

kerugian ekonomi negara-negara yang mengalaminya. Selain itu bajak laut juga menutup pintu perdagangan negara-negara tetangga terutama sektor pariwisata dan perikanan.

Dalam periode 2015 hingga 2017 Indonesia menjadi ketua IORA bersama dengan Afrika Selatan sebagai wakil ketua. Dengan letak geografis yang strategis yaitu diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera pasifik, Indonesia dapat menentukan masa depan negara dengan melakukan hubungan internasional dalam keterlibatan regional yang mengintegrasikan dua samudera sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri di kawasan dan mewujudkan peran aktif dari keterlibatan Indonesia.

Pada masa kepemimpinannya sebagai ketua IORA, Indonesia berkepentingan dalam kesejahteraan masyarakat pesisir yang mampu mengolah potensi kelautan secara berkelanjutan yaitu dengan menerapkan konsep *Blue Economy*. *Blue Economy* merupakan konsep pendekatan pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan ramah lingkungan. Karena ini konsep ini mempromosikan keberlanjutan dalam implementasiannya maka ekonomi biru dapat di jadikan sebagai pilihan utama bagi seluruh negara untuk menerapkannya agar efek jangka panjangnya dapat memberikan tindakan preventif dari kerusakan yang telah terjadi di bumi ini. Melalui prinsip *Blue Economy* peningkatan kemampuan dalam berinovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah diharapkan mampu mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara sangat efisien. *Blue Economy* menekankan pada empat prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yaitu zero waste, menyejahterakan sosial, inovatif adaptif dan keuntungan ekonomi ganda (Abd Wahab Hasyim 2014:7).

Samudera Hindia mempunyai pluralitas yang sangat tinggi, karena adanya keragaman budaya, suku, ras, agama, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan nasional, untuk itu dapat dikatakan sebagai kawasan yang istimewa dalam perpolitikan internasional yang disebabkan karena di kelilingi oleh negara-negara kepulauan. Selain itu dilihat dari perkembangan tiap Negeranya, memiliki perbedaan dalam jumlah populasi, pertumbuhan perekonomian negaranya,

perdagangan dan investasi, perkembangan teknologi, dan juga produk nasional bruto dari tiap negara di kawasan tersebut. Beberapa dari negara anggota G-20 maupun negara kepulauan kecil juga mendiami wilayah pesisir ini. Kawasan Samudera Hindia terdiri dari beberapa sub-kawasan, seperti Afrika Selatan dan Timur, Teluk Aden, Laut Oman, Asia Tenggara, dan juga Australasia. Sejumlah organisasi regional juga menjadi bagian dari kawasan ini, misalnya ASEAN, Gulf Cooperatoin Council (GCC), South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Southern African Development Community (SADC). (Roza, 2015)

IORA mendorong untuk menggunakan pandangan ‘open regionalism’ karena tingginya pluralitas di kawasan ini. Melalui pandangan ini, IORA melihat bahwa dapat membuka peluang kerja sama dan saling menguntungkan untuk dapat melakukan pembangunan ekonomi dari tiap negara anggotanya, tanpa mengusik kepentingan nasionalnya. Tantangan terbesar Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui pemanfaatan peluang kerjasama ini adalah, masih belum adanya peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, dan karena adanya perbedaan kekuatan ekonomi dan kepentingan strategis, maka akan sulit bagi Indonesia untuk dapat mempengaruhi kawasan ini secara menyeluruh. (Roza, 2015).

Ditingkat regional, IORA memandang pentingnya Samudera Hindia sebagai penghubung utama antara semua negara anggota IORA menjadi lebih diperhatikan dari sebelumnya terutama dengan meningkatnya minat pada sektor *Blue Economy* yang dianggap mempunyai potensi yang besar dan cepat untuk meningkatkan skala pertumbuhan GDP di wilayah Samudera Hindia. Sehingga untuk mencapai kepentingan tersebut, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan IORA agar kepentingannya terpenuhi.

Salah satu upaya dalam mencapai kesuksesan maritim serta panutan sebagai negara yang memiliki visi poros maritim dunia, memerlukan inovasi dalam mengembangkan konsep wawasan matra dengan menyeimbangkan program-program yang ada di IORA dan kepentingan nasional Indonesia. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, hal. 33)

Pembahasan *Blue Economy* di IORA berawal pada COMM ke 14 di Perth, Australia pada Oktober 2014 dengan memprioritaskan kegiatan ekonomi kelautan termasuk perikanan, energi terbarukan, eksplorasi mineral dan pariwisata pesisir dengan *Blue Economy* yang muncul sebagai sumber umum pertumbuhan ekonomi, inovasi dan penciptaan lapangan kerja untuk wilayah Samudera Hindia. Serta inisiasi diadakannya konferensi *IORA Blue Economy Core Group*. Yang merupakan inisiasi dari Afrika Selatan. Indonesia selaku Ketua IORA Periode 2015-2017 menekankan pentingnya tindak lanjut inisiatif *Blue Economy* sebagaimana yang di sepakati dari *IORA Leader's Summit* dan menghasilkan *Jakarta Concord* serta *IORA Action Plan* yang di selenggarakan di Jakarta. (Kemlu.go)

Blue Economy merupakan salah satu isu lintas sektoral IORA yang mendapatkan perhatian khusus negara-negara anggota sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja dan pendidikan berdasarkan manajemen sumber daya kelautan yang berkelanjutan. 6 Prioritas area kerja sama *IORA Blue Economy* yaitu, perikanan dan akuakultur, energi laut terbarukan, pelabuhan dan pelayaran, eksplorasi dan mineral dasar laut, penelitian dan pengembangan, serta pariwisata. (Sumber: Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika)

Gambar 1 Gambaran Mengenai *Blue Economy*



Sumber: Worldbank.org

Berdasarkan pada konsep *Blue Economy* yang di dapat dari worldbank.org, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Blue Economy* merupakan suatu upaya pemanfaatan alam yang berkelanjutan dengan bersumber dari sumber daya laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun tetap sesuai dengan esensi dari *Blue Economy* yaitu dengan efisiensi alam, minimalisasi limbah, serta inovasi dan kreatifitas. *Blue Economy* meliputi banyak kegiatan diantaranya adalah : energi terbarukan melalui energi laut, karena laut menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Dengan sendirinya, laut bisa menjadi sumber energi terbarukan terbesar serta berpotensi dalam pembangunan sosial dan ekonomi jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Di sektor pariwisata, laut dan pesisir dapat membawa peningkatan dalam hal lapangan pekerjaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam permasalahan perubahan iklim, yang berdampak pula pada ekosistem baik di lautan maupun di sepanjang garis pantai. Untuk itu lautan bermanfaat dalam penyerapan karbon dan membantu mengurangi perubahan iklim. Pada sektor perikanan, perikanan laut berkontribusi lebih dari \$210 miliar setiap tahun terhadap GDP global.

Perikanan yang lebih stabil dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan, lebih banyak ikan dan membantu memulihkan stok ikan. Selanjutnya di sisi

pengelolaan limbah, kurang lebih sebanyak 80% sampah di lautan berasal dari sumber-sumber berbasis daratan. Pengelolaan limbah yang lebih baik di darat dapat membantu pemulihan lautan, selain itu pencemaran dan sampah laut baik dari sumber darat maupun laut mengancam biodiversitasnya. Serta di sisi transportasi maritim, lebih dari 80% barang-barang internasional yang diperdagangkan diangkut melalui laut, dan volume perdagangan lewat laut pada tahun 2030 di prediksi akan meningkat dua kali lipat dan empat kali lipat pada tahun 2050.

Pada hakikatnya Indonesia adalah negara maritim dimana memiliki banyak pulau-pulau serta keragaman sumber daya hayati laut yang melimpah. Jika dapat dikelola secara tepat dan dengan cara-cara yang matang dalam industri perikanan dan kemaritiman maka akan berdampak positif bagi Indonesia, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjadi negara pengekspor perikanan terbanyak di dunia. Kebijakan nasional berbasis ekonomi biru merupakan hal yang dapat dikatakan baru diadopsi di Indonesia pada tahun 2012, namun meskipun begitu Indonesia tampak berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam merealisasikannya secara terpadu, Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan aktor internasional dan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Salah satunya yaitu bersama dengan IORA dalam mendukung terwujudnya *Blue Economy*.

Menyandang predikat negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat mengandalkan potensi kelautannya sebagai prospek ke depan dalam bidang ekonomi. Berbagai potensi yang ada pada kelautan seperti ikan, minyak, gas, terumbu karang, mineral telah dicadangkan oleh laut, untuk itu diperlukan garapan yang optimal dengan berdasarkan pada keramahan lingkungan guna memenuhi kepentingan bangsa. (berkas.dpr.go.id)

Anugerah Indonesia sebagai negara yang sangat luas dari Sabang sampai Marauke dengan berbagai macam sumber daya alam yang berlimpah serta penduduk lebih dari 257.912.394 jiwa (Badan Pusat Statistik : 2016) membuat Indonesia harus bekerja keras untuk mensejahterahkan seluruh rakyatnya. Adanya peningkatan tuntutan kebutuhan hidup secara terus menerus merupakan dampak dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, sedangkan sumber daya yang di darat

jumlahnya sangat terbatas dan memerlukan waktu untuk memperbaharunya. Alasan itu memotivasi Indonesia untuk melakukan inovasi dengan mengalihkan alternatif dari potensi sumber daya lainnya yang dimiliki yaitu potensi kelautan. Sebagai sumber dalam meningkatkan perekonomian sumber daya tersebut dapat dijadikan modal bagi Indonesia. Jika dilihat dari aspek geografis, potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat luas di antaranya ada 5 kemampuan yang dapat diandalkan dari laut, yaitu potensi perikanan dan jasa kelautan, potensi keanekaragaman hayati, potensi wilayah pesisir, potensi pariwisata dan potensi mineral, minyak dan gas bumi.

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Untuk itu *Blue Economy* di butuhkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

Banyak permasalahan yang dijumpai dalam sektor perikanan di Indonesia antara lain maraknya penangkapan ikan secara ilegal dan melanggar kedaulatan suatu negara, beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing, selain itu juga masih belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional, belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan, selain itu pula masalah yang terjadi terkait dengan batas laut dan pengawasan kelautan masih menjadi salah satu kendalanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Pasal 2 dikatakan bahwa “ZEEI adalah jalur terluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

Mengacu kepada tujuan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan berdasarkan pada undang-undang No. 17 Tahun 2007 mencantumkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional untuk mencapai Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Pada misi ke tujuh, yaitu “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional” melalui pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Seperti yang di mandatkan dalam strategi pembangunan nasional dengan pembangunan yang berkelanjutan, maka berdasarkan konsep *Blue Economy* dengan semangat yang pro terhadap yang miskin, pro pertumbuhan, pro lingkungan, dan pro pekerjaan dapat mengimplementasikan UU tersebut sesuai dengan visi misi Indonesia.

Ekonomi Biru sudah diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di dalamnya berisikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*Blue Economy*). Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia.

Dalam Deklarasi World Summit on Food Security pada Nomor 2009, diperkirakan akan memberlakukan keharusan bagi negara-negara untuk dapat meningkatkan cadangan pangannya (termasuk juga perikanan) sebesar 70% hingga tahun 2050 dengan ditujukan agar dapat menjamin pangan masyarakat dunia kelak, karena pertumbuhan populasi yang kian meningkat. Kaitannya dengan deklarasi tersebut, Indonesia telah menerapkan model *Blue Economy* tersebut pada sektor industri perikanan. Karena begitu pentingnya perikanan, yang dapat memberikan segudang manfaat dengan memiliki sumber gizi dan protein yang tinggi, untuk itu

di berbagai negara kontribusi perikanan terus meningkat guna memberikan keamanan bagi pangan dunia.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis akan memfokuskan penelitian terkait *Blue Economy* di bidang perikanan. Sektor perikanan sangat menarik untuk dikaji karena dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang perikanan dan kelautan khususnya di kawasan Samudera Hindia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis tertarik mengambil pertanyaan penelitian yaitu : **“Bagaiman kebijakan Indonesia di Indian Ocean Rim Association dalam mendukung *Blue Economy* di Bidang Perikanan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini di susun dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana Indonesia dalam mendukung kebijakan *Blue Economy* pada bidang perikanan di *Indian Ocean Rim Association* (IORA) periode 2015-2017 dan upaya yang dilakukan Indonesia dalam mendukung kebijakan *Blue Economy*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa/i mengenai kebijakan Indonesia di *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dalam mendukung *Blue Economy* di Bidang Perikanan.
2. Manfaat Praktis, dapat menjadi penelitian lebih lanjut sebagai literatur tambahan dalam mempelajari dan menganalisa mengenai *Blue Economy* serta sebagai sumbangan pemikiran untuk para akademisi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis akan membahas mengenai literature review, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori-teori dan konseptual, alur pemikiran dan asumsi/hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yaitu, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan penelitian serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG *INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)* DAN KONSEPSI *BLUE ECONOMY*.

Pada bab keempat ini penulis akan membahas tentang IORA di Samudera Hindia, Keketuaan Indonesia di IORA, serta *Blue Economy* di IORA.

BAB V : KEBIJAKAN INDONESIA DI *INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)*.

Pada bab kelima ini merupakan hasil analisa yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama, penulis akan menjelaskan tentang kebijakan Indonesia di *Indian Ocean Rim Association (IORA)* dalam mendukung *Blue Economy* dengan terfokus di bidang perikanan. Sub bab kedua, penulis akan menjelaskan tentang kondisi

perikanan Indonesia dengan adanya *Blue Economy*. Dan sub bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang peluang dan hambatan dalam mendukung kebijakan *Blue Economy* di IORA.

BAB VI : KESIMPULAN

Pada bab keenam ini berisi kesimpulan dari penelitian yang diperoleh dari BAB I, II, III, IV, V yang akan menjawab pertanyaan penelitian serta saran guna masukan terkait akan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

